



CEGAH PENJUALAN CAGAR BUDAYA

Pemkot Beri Keringanan Pembayaran PBB

YOGYA (KR) - Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto pada Agustus mendatang resmi memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pemilik Benda Cagar Budaya (BCB) yang menjadi heritage di kawasan Kotagede.

Walaupun begitu, warga merasa kurang puas dengan sikap ini dan menginginkan bukan hanya pengurangan pembayaran PBB. Warga meminta pemerintah lebih memperhatikan kondisi kawasan tersebut, salah satunya dengan memberikan sertifikat penghargaan pada warga.

Joko Nugroho (46), salah seorang pemilik bangunan kuno di kawasan Kampung Alunalun RT 37 RW 09 Kelurahan Purbayan Kotagede kepada KR, Rabu (17/6) menuturkan maraknya penjualan BCB banyak terjadi bukan hanya karena masalah ekonomi, namun lebih pada masalah keluarga. "Selama ini kami tak pernah didatangi atau didata oleh petugas dari Pemkot untuk di beri

sertifikat," katanya.

Pasca gempa 2006 lalu, lanjut Joko Nugroho, bangunan kuno dikawasan itu hampir semuanya rata dengan tanah. Namun dari pemerintah tidak ada yang *ngaruhke* sama sekali. "Ini yang saya maksud kepedulian mereka masih kurang, kami tahu kondisi Pemkot yang tidak mungkin memberikan insentif atau membeli semua rumah kuno yang ada disini tapi kepedulian mereka itu lebih penting," tuturnya

Dilain pihak, Walikota Yogyakarta mengaku jika ia telah mengadakan dialog dengan perwakilan warga. Dari dialog ini diambil kesepakatan akan memberikan keringanan pembayaran PBB berdasarkan *scoring* atau penilaian yang se-

lesai pada Agustus. Untuk *scoring* tertinggi mendapat keringanan hingga 90 persen.

"Kenapa tidak kami berikan keringanan bukan pembebasan supaya mereka memiliki tanggungjawab. Kalau Pemkot membeli semua BCB yang ada memang tidak mungkin," ujarnya.

Lurah Purbayan, Sudarmaji pada KR membenarkan adanya pertemuan antara walikota dengan tokoh masyarakat serta pemerhati lingkungan pada Sabtu (13/6) lalu. Diakui pihaknya merasa kurang puas karena dalam hal ini Walikota tidak duduk bersama untuk berdialog langsung dengan warga pemilik BCB. Melainkan hanya memanggil wakil warga yang jumlahnya tidak lebih dari tujuh orang. "Kami ingin Pak Wali mau duduk bersama dengan warga di Kotagede, keinginan kami seperti ini dan belum ada tindak lanjut kami masih menunggu konfirmasi lagi," jelasnya. (*-2)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005